**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Kekuatan finansial, kekuatan produksi dan juga ilmu pengetahuan merupakan aset yang sangat berharga yang dapat dimiliki oleh suatu negara, dimana kekuatan-kekuatan tersebut mampu menjadi kunci dalam kemajuan sebuah bangsa. Akan tetapi apabila negara masih belum mampu mebangun kekuatan-kekuatan tersebut, maka negara tersebut perlu mengadakan kerjasama dengan negara yang lebih maju agar dapat membuat negara itu menjadi lebih baik lagi. Hal ini terjadi pada Indonesia, yang dimana kekuatan struktural yang dimilikinya masih bisa dikatakan sedang berkembang. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk mengadakan kerjasama bilateral dengan Jepang yang digolongkan sebagai negara maju.

Jepang dan Indonesia telah menjalani beberapa kerjasama bilateral yang bertujuan untuk memajukan perekonomian kedua negara. Saat ini kerjasama antara Indonesia dan Jepang juga masih terus berlanjut dengan kerjasama ekonomi yang saat ini sudah dijalani oleh kedua negara, dan kerjasama itu adalah IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) dimana kerjasama ini merupakan kerjasama ekonomi bilateral antara Jepang dan Indonesia yang mencakup 11 bidang, atau kelompok perundingan yaitu; *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures, Trade in Services, Invesment, Movement of Natural Persons, Government Procurement, Intellectual Property Rights, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, and Cooperation.*[[1]](#footnote-1)

Beberapa alasan yang mendasari Indonesia menjalin kerjasama melalui IJEPA dengan Jepang diantaranya adalah:

1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang.

2. Akses Pasar untuk produksi Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia.

3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil.

4. IJEPA memberi kepastian akses pasar yang lebih prefensial dan luas dibandingkan dengan program seperti Generalized System of Preferences (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia dan Jepang (*Indonesian Japan Economic Partnership Agreement*) IJEPA yang ditandatangani tahun 2007 lalu menandakan secercah peluang tersendiri bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Selain itu juga IJEPA berpengaruh terhadap pengiriman TKI ke Jepang.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002), merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja diluar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia.

Pengiriman TKI dilakukan ke negara-negara ekonomi maju di sekitar Asia seperti Jepang, Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, Korea, Malaysia dan juga ke negara Arab. Pengiriman TKI dilakukan dikarenakan permintaan yang tinggi dari negara-negara tujuan tersebut juga disebabkan beberapa hal, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, dan juga besarnya gaji serta fasilitas yang dijanjikan. Seperti halnya permintaan negara Jepang.

Negara Jepang adalah negara yang maju, untuk bisa menembus lapangan pekerjaan ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Karena persaingan yang ketat dan persyaratan yang lumayan rumit dibanding negara lain. Penyaluran tenaga kerja ke Jepang, menggunakan sistem magang (*trainee*). Dengan sistem kontrak kerja selama 3 tahun dan proses seleksinya melalui Kemnaker setempat (Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Bandung dan Medan).

Pengiriman TKI ke Jepang menggunakan sistem *Government to Government* (G to G), permintaan tenaga kerja Indonesia oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam IJEPA.[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **Peranan IJEPA dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia sektor formal (nurse) ke Jepang.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menangani masalah pengiriman TKI sektor formal (*nurse*) ke Jepang?
2. Bagaimana peranan Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam pengiriman TKI sektor formal (*nurse*) ke Jepang?
3. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai Peranan dari IJEPA dalam pengiriman TKI sektor formal (*nurse*) ke Jepang.

1. **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan tingkat lanjut dari identifikasi masalah perumusan masalah dalam penyusunan skripsi dimaksud agar dalam pengembangan masalah tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Adapun perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

“Sejauh mana peranan IJEPA dalam pengiriman TKI sektor formal (*nurse*) ke Jepang?”

**C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui keuntungan dan manfaat kerjasama IJEPA bagi Indonesia
2. Mengetahui bagaimana peranan IJEPA dalam pengiriman TKI sektor formal (*nurse*) ke Jepang

**2.Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari penelitian.(Suriasumantri, 1996: 313).

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pembendaharaan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional, khususnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian
2. Untuk memberikan pemahaman bagi penulis khususnya dan kalangan akademik pada umumnya mengenai perilaku ekonomi politik sebuah negara dalam mencapai kepentingan nasional dalam kancah internasional
3. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian sejenis sehingga aspek yang belum tergali dalam penelitian ini dapat digali dan dikembangkan lebih lanjut
4. Sebagai syarat dalam menempuh ujian sidang program sarjana strata satu (S-1) pada jurusan hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

**D. Kerangka Teoritis Dan Hipotesis**

**1. Kerangka Teoritis**

Sebagai penunjang dari laporan ini akan menggambarkan tinjauan teori, yaitu konsep daripara pakar dibidangnya sebagai acuan dasar. Pemakaian teori yang diajukan penulis dimaksudkan sebagai pijakan awal bagi teori-teori yang dimunculkan adalah teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan Hubungan Internasional.

Pengertian Theodore Colombus dan James H. Wolfe mengemukakan sebagai berikut:

Teori, adalah sekumpulan generasi empiris yang secara konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan) dan eksplanatori (menjelaskan).[[3]](#footnote-3)

Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu abstraksi atau generalisasi yang dapat membantu kita menata pengetahuan untuk tujuan penyelidikan yang bersifat teoritis. Beberapa konsep dasar di bidang politik, adalah keadilan, kekuasaan, kebebasan, kepentingan, persamaan, keamanan, konflik, perdamaian dan partisipasi.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi Hubungan Internasional menurut K. J. Holsti dalam bukunya

Politik Internasional suatu kerangka analisis yaitu:

**“Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politikluar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”[[5]](#footnote-5)**

Dalam Hubungan Internasional terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta menentukan arah dan kebijakan tingkah laku negara yang ditujukan pada negara lain. Politik luar negeri merupakan komponen kebijakan politik internasional, yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi wilayah dalam negeri. K. J. Holsti menyatakan bahwa, “politik internasional merupakan kebijakan politik luar negeri, dimana kebijakan ini didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang merumuskan tujuan, menentukan preseden-preseden atau melakukan tindakan-tindakan yang diambil untuk memusatkan atau mengimplementasikan keputusan itu”[[6]](#footnote-6)

Suatu negara akan berinteraksi dengan negara lain dalam mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan internasional, sedangkan bentuk interaksi dari hubungan yang dilaksanakan telah ditetapkan oleh masing-masing negara didalam kebijaksanaan politik luar negerinya. Perihal hal tersebut, maka **Mochtar Kusumaatmadja** berpendapat:

**“Politik luar negeripada hakekatnya alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijaksanaan luar negeri, merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri, merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang”**

Kebijakan merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi kepentingan nasional negara. Menurut T. May Rudy bahwa, “kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya.[[7]](#footnote-7) Kemudian K. J. Holsti mengemukakan:

**“Kebijakan luar negeri adalah tindakan ide yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan dalam lingkungannya, yaitu dalam kebijakan, sikap atau tindakan negara.”[[8]](#footnote-8)**

Adanya interaksi merupakan kunci dari politik internasional yaitu menerangkan hubungan antar negara bangsa yang berusaha saling mempengaruhi demi memaksimalkan kepentingan dari masing-masing negara yang disebut juga dengan kepentingan nasional, seperti dipaparkan oleh A. Dahlan Nasution dalam bukunya Politik Internasional, konsep dan teori, yaitu:

**“Kepentingan nasional memberikan konstelasi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan mewujudkan ke arah usaha tujuannya daripada merubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru.” (Nasution 1983:43)**

Suatu negara yang selalu memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi apapun akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan tujuannya daripada merubah kepentingannya.

Maka **kepentingan nasional Indonesia** adalah:

**“Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdasakan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”**

Dengan demikian, adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi serta mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya, maka memerlukan suatu kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional. Pemahaman mengenai kerjasama internasional, dikemukakan oleh Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional.

Adapun pengertian kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

**“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.”[[9]](#footnote-9)**

Atas dasar pendapat diatas, berkaitan dengan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari peran faktor gabungan antara kerjasama internasional dan ekonomi politik internasional. Dimana dalam kerjasama internasional yang begitu kompleks ini, suatu kebijakan politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan perekonomian negaranya. Dan begitu pula sebaliknya, kebijakan-kebijakan ekonomi suatu negara dalam konteks interaksi internasionalnya tidak akan terlepas dari pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan politik luar negerinya.

Berdasarkan definisi dan jenis kerjasama internasional diatas, kerjasama Indonesia dan Jepang merupakan suatu kerjasama fungsional yang termasuk dalam kerjasama fungsional karena kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi di kedua negara tersebut.

Salah satu aspek kerjasama diantaranya dalam bidang ekonomi maupun politik. Menurut **Mohtar Mas’oed** dalam bukunya Ekonomi – Politik Internasional dan Pembangunan, mendefinisikan tentang Ekonomi Politik Internasional sebagai berikut:

**“...tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antar “negara” dan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat... ekonomi didefinisikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.”[[10]](#footnote-10)**

Setiap pemerintah suatu negara tertentu, tentunya mempunyai kewajiban untuk memperoleh dan meningkatkan kemakmuran ekonomi bagi warga negaranya. Demi tujuan ini, maka untuk mencapai kemajuan ekonominya, suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, dengan harapan bahwa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri dapat diperoleh dari hasil interaksinya dengan negara lain yang mempunyai kelebihan akan hal itu, baik itu secara bilateral maupun multilateral. Sebagaimana telah dijelaskan oleh R. E. A. Ma’moer dalam bukunya berjudul Ekonomi Internasional, bahwa tujuan ekonomi internasional adalah sebagai berikut:

**“Tujuan dari ekonomi internasional adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan dari ekonomi internasional merupakan kerjasama membantu antar negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhan yang tidak dapat, akan dipenuhi.”**

Kerjasama antar negara terjalin dalam bidang dan salah satunya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini adalah ekonomi internasional karena menyangkut perekonomian antar dua negara atau lebih. Adapun definisi ekonomi internasional menurut Boediana dalam bukunya Ekonomi Internasional adalah:

**“Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional antara satu negara dengan negara lain. Hubungan ekonomi bisa berupa pertukaran hasil atau aliran sarana produksi, hubungan ekonomi, bisa berbentuk hubungan kriditnya.”[[11]](#footnote-11)**

Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (*skill*) menjadi barang dan jasa.

Perkembangan yang terjadi di dunia semakin lama berlangsung semakin cepat dan sulit prediksi. Perubahan gaya hidup yang dulu di bangun selama berpuluh tahun kini dapat berubah dalam waktu yang lumayan singkat yakni bisa dikatakan satu tahun.

Untuk itu kita dituntut untuk berbenah diri untuk menyongsong tantangan yang akan dihadapi apabila kita siap dan terus bertahan maka dapat mempertahankan keadaan ekonomi apabila sebaliknya maka akan terombang ambing oleh pahitnya kehidupan. Dari uraian di atas maka kita memerlukan sistem untuk mengatur perekonomian.[[12]](#footnote-12) Sistem sendiri menurut Chester A. Bernard adalah:

**“suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang didalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas sendiri.”**

Maka sistem ekonomi menurut Dumairy (1996) yaitu:

**“Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara.”**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

**“Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu aturan atau tata cara untuk mengikat perilaku masyarakat (konsumen, produsen dan pemerintah) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan ideologi bangsa Indonesia.”[[13]](#footnote-13)**

Salah satu strategi yang harus ditempuh untuk mendukung pembangunan suatu negara dalam bidang ekonomi yaitu industrialisasi. Industrialisasi sendiri menurut Edi Suwandi Hamid dalam bukunya Industrialisasi mengatakan bahwa industrialisasi adalah:

**“Industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang yang dilaksanakan di dalam negeri, yang di imbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.”[[14]](#footnote-14)**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis perlu mengemukakan inti dari permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penulis melihat bagaimana upaya dari setiap negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya salah satunya dengan melakukan kerjasama internasional. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Jepang dalam bidang industri melalui Indonesian – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. IJEPA adalah:

**“IJEPA adalah sebuah kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antar Indonesia dan Jepang. IJEPA merupakan perjanjian kerjasama Ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe.”**

Terbentuknya kerjasama IJEPA ini tidak terlepas dari sejarah diplomasi antara Indonesia dan Jepang dimana awal mulanya dimana Indonesia merupakan salah satu negara jajahan Jepang 1958, Jepang dan Indonesia memulai hubungan diplomatik bilateral secara resmi untuk memperbaiki hubungan antar kedua negara. S. L. Roy dalam buku *Diplomacy* mempunyai definisi tentang diplomasi yang diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, sebagai berikut:

**“Diplomasi yang sangat erat hubungannya dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal dalam meperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengijinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. (Roy, 1991:15)**

Saat ini kerjasama internasional diantara dua negara menyangkut segala aspek/bidang diantaranya kerjasama dalam bidang penempatan Tenaga Kerja suatu negara ke negara lainnya yang dituangkan dalam bentuk kerjasama bilateral. Tenaga kerja merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk banyak, begitu juga dalam hal tenaga kerjanya. Oleh karena itu apabila tenaga kerja dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi.

Dibanyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang bersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama disebagian negara-negara berkembang, khusunya di Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan. Tapi hal ini sulit dilakukan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggul, adalah sebagai berikut:

**“Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat” (Tunggul, 2009: 18)**

Dibanyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlahlapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama disebagian negara-negara berkembang, khusunya di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak tenaga kerja melakukan migrasi ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan.

Migrasi internasional saat ini masuk dalam pembahasan yang penting dalam studi Hubungan Internasional. Hal ini seperti dikemukakan Yanyan Moh. Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* sebagai berikut:

**“Isu-isu dalam Hubungan Internasional saat ini tidak terpaku pada *power* saja. Migrasi Internasional saat ini merupakan salah satu isu dalam studi Hubungan Internasional. Seiring meningkatkan interaksi antara aktor-aktor Hubungan Internasional, batas-batas geografis antar negarapun semakin tidak jelas. Perpindahan penduduk antar negara semakin mudah. Secara umum masalah ini bertumpu pada hal adanya imigrasi secara legal dan tidak legal...” (Perwita & Yani, 2005: 150).**

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka penempatan TKI di negara Jepang berkaitan dengan salah satu pendorong dan penarik bagi migrasi Internasional, yaitu kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memperoleh standar kehidupan dan tempat tinggal yang lebih baik.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI ke luar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-104A/MEN/2002).

Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, maka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja diatur dengan Undang-Undang tersebut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengatakan dengan keluarnya UU tersebut semua keputusan Menteri, SK Eselon I yang terkait dengan masalah penempatan dan perlindungan TKI tidak berlaku lagi.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut *Pasal 1 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,* adalah:

**“Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. TKI dapat bekerja ke seluruh negara tujuan penempatan, dimana negara tujuan tersebut memiliki peraturan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan tidak membahayakan keselamatan TKI” (Pasal 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).**

Permintaan TKI oleh pemerintahan Jepang merupakan salah satu poin yang tertuang dalam IJEPA (*Indonesian Japan Economic Partnership Agreement*) kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNP2TKI dan *Japan Internasional Corporation of Welfare Services* (JICWELS) pada 19 Mei 2008 di Jakarta dan juga amandemen MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan *The Associations For International Manpower Development of Medium and Small Enterprises Japan* (IMM) pada tanggal 6 September 2008.[[15]](#footnote-15)

**2.Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran, perumusan masalah, serta asumsi-asumsi yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Jika peran IJEPA dapat dilakukan dengan efektif, maka Tujuan pemerintah Indonesia dalam melakukan pengiriman TKI sektor formal (*nurse*) ke Jepang akan tercapai dengan baik yang ditandai dengan meningkatnya permintaan pemerintah Jepang terhadap TKI sector formal (*nurse*) ke Jepang”**

**3.Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Untuk lebih memperjelas sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian dan juga hipotesis, maka operasionalisasi variabel dituangkan ke dalam tabel di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA | Adanya MOU antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam kerjasama penempatan TKI ke Jepang melalui skema G to G. | Data dan fakta MOU.  (Sumber: BNP2TKI) |
| Maka pengririman TKI dari Indonesia ke Jepang setiap tahunnya meningkat. | Meningkatnya kuota pengiriman TKI ke Jepang yang ditandai dengan meningkatnya permintaan dari Jepang | Data dan fakta mengenai peningkatan permintaan TKI sektor formal (nurse) ke Jepang  (Sumber: Dokumen BNP2TKI) |

**4.Skema Kerangka Teoritis**

Pemerintah Jepang

Pemerintah Indonesia

TKI

JICWELS

BNP2TKI

IJEPA

Skema G to G

Peningkatan permintaan TKI sektor formal (nurse) ke Jepang

**E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat memandu dan memudahkan penelitian dalam berhubungan dengan objek penelitian. Metode adalah salah satu cara atau langkah yang diterapkan dalam melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara-cara pemecahannya berdasarkan atas data-data yang dihimpun. Dalam kesempatan ini, metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis.

* 1. *Metode Deskriptif Analitis*, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengklarifikasi serta menganalis fenomena atau gejala aktual yang berkembang dewasa ini yang ditunjang oleh beberapa pendekatan dengan maksud untuk memudahkan cara memandang sebagai analisis dan wawasan tantangan permasalahan yang tengah terjadi.
  2. *Metode Historis Analisis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membahas, menganalisis dan mengkaitkan kejadian masa lampau yang berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi atau bahkan terhadap hal-hal yang dapat terjadi di masa yang akan datang, yang kesimpulan pada masa lalunya dikomparasikan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini.

**2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Dalam melakukan studi kepustakaan, penulis mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan penelitian ini berbagai referensi dan pustaka. Selain itu, dalam memanfaatkan sumber informasi melalui teknologi yang dirasakan berkembang saat ini, penulis juga memanfaatkan fasilitas internet untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan objek tujuan memperoleh data primer yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.

**F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa tempat yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap serta akurat mengenai pembahasan yang diteliti. Adapun lokasi-lokasi tersebut antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung

Jalan Lengkong Dalam No. 17D Bandung

1. Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Jalan MT. Haryono Kav. 7 No. 52 Jakarta

**2. Lama Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, terhitung dari bulan September 2015 hingga Februari 2016.

**G. Sistematika Penulisan**

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS

Bab II berisikan uraian variabel bebas yaitu peranan IJEPA dalam pengiriman TKI sektor formal (nurse) ke Jepang.

BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT

Bab III berisikan tentang variabel terikat mengenai mekanisme pengiriman TKI sektor formal (nurse) ke Jepang.

BAB IV: VERIFIKASI DATA

Bab ini akan membahas, menguraikan, serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

BAB V: PENUTUP DAN SARAN

Bab yang merupakan penutup dari penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang menjadi fokus kajian.

1. *“Hubungan Perekonomian Indonesia – Jepang”* dalam<http://www.id.emb-japan.go.jp/bire1Eco_id.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. *“Pengiriman TKI ke Jepang”* dalam http:www.kabarindonesia.com, diakses pada tanggal 16 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. Theodore Coloumbis dan James H. Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional (Terjemahan Mercedes Marbun) (Bandung 2011), hlm 30. [↑](#footnote-ref-3)
4. Theodore Coloumbis dan James H. Wolfe, *Op Cit,* Bandung 2011, hlm 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. K. J. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Djuanda) (Bandung: Binacipta, 1987), hlm 26 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Op Cit,* hlm 135 [↑](#footnote-ref-6)
7. T. May Rudy, *Op Cit,* hlm 9 [↑](#footnote-ref-7)
8. K. J. Holsti, *Op Cit,* hlm 135 [↑](#footnote-ref-8)
9. Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional* (Bandung: Fisip UNPAD Press, 1983), hlm 83 [↑](#footnote-ref-9)
10. Mohtar Mas’oed, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 4 [↑](#footnote-ref-10)
11. Boediana, Ekonomi Internasional, (Jakarta: LP3S, 1981), hlm 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. *“Sistem Perekonomian Indonesia”* dalam http://www.slideshare.net/AchmadZain/, diakses tanggal 17 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Edi Suwandi Hamid, Industrialisasi (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm 190 [↑](#footnote-ref-14)
15. *“Pengiriman TKI ke Jepang”* dalam [http://www.kabarindonesia.com/](http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Pengiriman+208+YKI+ke+Jepang&dn=20080805161624), diakses tanggal 17 Maret 2016 [↑](#footnote-ref-15)